

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK

Nomor : /DIR-PJA/IX/2026

Tentang

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK**

DIREKSI PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;

2. Bahwa dalam Surat Keputusan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Nomor 018 Tahun 2017 tentang informasi yang dikecualikan untuk diberikan oleh Perseroan.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Perseroan memandang perlu untuk menetapkan suatu Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Perseroan dalam suatu Surat Keputusan Direksi.

MENGINGAT : Akta Pendirian PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Akta Notaris Pengganti Achmad Abid, S.H., No. 33 tanggal 10 Juli 1992 tentang Anggaran Dasar PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 1992 Tambah No 6071, Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 18 tanggal 8 Juni 2025, dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., MKn sebagai pengganti dari Stjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-3530274.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 07 Juli 2025.

MEMPERHATIKAN : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKSI PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI PT
PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK
- PERTAMA : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di PT Pembangunan
Jaya Ancol Tbk, sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana terlampir, menjadi
acuan bagi Perusahaan dalam menyusun dan memberikan informasi terkait
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
- KETIGA : Menugaskan kepada Unit Kerja terkait untuk melaksanakan Surat Keputusan
Direksi ini dengan sebaik-baiknya;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah, diperbaiki kembali apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dan/atau ketidaksesuaian lagi.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 September 2026
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk

Ttd

Syahmudrian Lubis
Direktur Utama

Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Nomor : /DIR-PJA/IX/2026

Tanggal : 22 September 2026

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK**

No	DAFTAR/JENIS INFORMASI	UNIT KERJA	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK	
			DIBUKA	DITUTUP
INFORMASI PRIBADI :				
1.	Data, Informasi dan dokumen pribadi pegawai/karyawan dalam dokumen administrasi dan sistem informasi seperti : Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal /Bulan/Tahun lahir, Agama, Golongan Darah, Status Perkawinan, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, NIK Ibu kandung, Nama Ibu Kandung, NIK Ayah, Nama Ayah, Alamat sebelumnya, Alamat sekarang, Akta kelahiran, Nomor Akta kelahiran, Akta Perkawinan, Buku Nikah, Tanggal Perkawinan. Akte Perceraian, Nomor Akta Perceraian, Tanggal Perceraian, Tanda Tangan, Riwayat kondisi Keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam Medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan (Gaji). Rekomendasi Kemampuan	Human Capital Corporate Office	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi dan dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi karyawan/pegawai
2.	Data, Informasi dan dokumen pribadi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dalam dokumen administrasi dan sistem informasi seperti : Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal /Bulan/Tahun lahir, Agama, Golongan Darah, Status Perkawinan, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, NIK Ibu kandung, Nama Ibu Kandung, NIK Ayah, Nama Ayah, Alamat sebelumnya, Alamat sekarang, Akta kelahiran, Nomor Akta kelahiran, Akta Perkawinan, Buku Nikah, Tanggal Perkawinan. Akte Perceraian, Nomor Akta Perceraian, Tanggal Perceraian, Tanda Tangan, Riwayat kondisi Keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam Medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan (Gaji). Rekomendasi Kemampuan	Human Capital Corporate Office	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi dan dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
3.	Informasi Hasil Assestment/Promosi Pegawai (hasil psikotest, wawancara, kesehatan /medical check up)	Human Capital	Dapat membuka informasi seseorang dan dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pegawai
4	Nama Pengguna Kendaraan Pegawai, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris	Corporate Office (Protokol) Human Capital	Dapat membahayakan keamanan seseorang dan atau Dewan Direksi	Melindungi keamanan pegawai, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

			dan Dewan Komisaris	
INFORMASI DATA ASET PERSEROAN :				
1.	Informasi Aset Tanah, Bangunan, Benda bergerak maupun tidak bergerak	Warehouse & General Affairs	Untuk kepentingan Laporan Tahunan	Melindungi keamanan aset, sarana prasana perseroan
2.	Informasi fasilitas dan perkembangbiakan satwa/biota perseroan	Water & Animal Park	Untuk kepentingan penelitian dan konservasi ilmiah	Melindungi keamanan satwa dan fasilitasnya
3.	Informasi Anggaran & Rencana Kerja Perseroan	Corporate Office	Untuk kepentingan Laporan Tahunan (Annual Report)	Melindungi dari persaingan usaha
INFORMASI DATA DOKUMEN LEGAL :				
1.	Surat Keputusan Direksi terkait Harga Tiket	Legal & Permit	Untuk kepentingan operasional bisnis	Melindungi penyalahgunaan informasi data
2.	Surat Keputusan Direksi terkait Kerjasama Investasi	Legal & Permit	Untuk kepentingan investor	Melindungi penyalahgunaan informasi
3.	Surat Keputusan Direksi terkait Kerjasama Penjualan Tiket	Legal & Permit	Untuk kepentingan bisnis mitra kerjasama	Melindungi penyalahgunaan informasi dan persaingan bisnis yang sehat
4.	Surat Keputusan Direksi terkait Kebijakan Perusahaan (SK Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri, SK Remunerasi, SK Kebijakan Penghargaan Karyawan/pegawai)	Legal & Permit Human Capital	Untuk kepentingan internal perseroan	Melindungi penyalahgunaan informasi
5.	Surat Perjanjian Kerjasama Mitra yang masih proses (bentuk dan konsep kerjasama, nilai kerjasama, hak dan kewajiban kerjasama, jangka waktu kerjasama)	Legal & Permit Commercial Div	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi dan untuk kepentingan internal perseroan	Melindungi penyalahgunaan informasi
INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA :				
1.	Informasi Dokumen mitra/vendor pengadaan barang dan jasa	Procurement	Untuk kepentingan internal perseroan	Melindungi penyalahgunaan informasi dan persaingan bisnis yang sehat
2.	Informasi list data mitra kerjasama	Procurement Commercial Div Event & Partnership	Untuk kepentingan internal perseroan	Melindungi penyalahgunaan informasi dan persaingan bisnis yang sehat
INFORMASI PENGAWASAN INTERNAL :				
1.	Informasi pelapor adanya indikasi pelanggaran oleh oknum terkait penerapan Good Corporate Government (GCG) dan Whistle Blowing System	Intenal Audit	Dapat menimbulkan keresahan pribadi yang bersangkutan dan Untuk kepentingan internal perseroan	Melindungi keamanan & identitas pelapor dan untuk investigasi lebih lanjut
INFORMASI MEDIA RILIS :				
1.	Informasi Tanggapan Media terhadap krisis yang sedang terjadi	Corporate Communication	Menimbulkan tekanan atau konflik dengan	Menjaga kerahasiaan mekanisme

			pihak lain	penyelesaian sengketa
2.	Informasi yang belum dikuasai atau belum didokumentasikan	Corporate Communication	Dapat menimbulkan informasi yang tidak valid	Menghindari penyalahgunaan informasi dan distribusi data informasi serta menjaga keakuratan informasi data